



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
2016-2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Kebumen harus menetapkan RPJMD sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD

Rencana strategis merupakan dokumen resmi daerah yang disyaratkan untuk pengarahannya pelayanan Perangkat Daerah khususnya pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun mendatang, disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Perangkat Daerah .

Guna meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

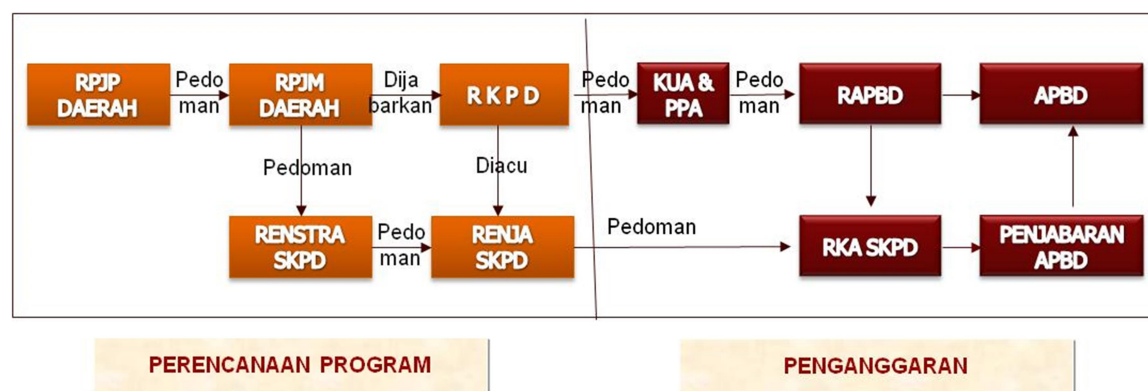
Hubungan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dengan Dokumen Lainnya

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah lain.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja Perangkat Daerah setiap tahun anggaran.
3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai deriviasi Renstra Perangkat Daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.

Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya dituangkan dalam Gambar 1.1



Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Kebumen Lainnya.

## B. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Undang-Undang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Rwwepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  11. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  12. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
22. Peraturan daerah kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, tambahan Lembaran daerah kabupaten Kebumen Nobmor 96);

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat visi, misi dan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
2. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan

sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang pencapaian pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan **3 pelayanan:** *Si Patma*, *Counter Service Point*, dan *Si Julang Loncat* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berorientasi pada hasil;
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

#### D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan lampiran yang memuat perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika penulisan.

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, serta sarana dan prasarana serta Ruang Lingkup Kegiatan/Pelayanan.

##### BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi Isu-isu strategis, telaah visi Misi dan Program Kepala Daerah dan penentuan isu-isu strategis).

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.**

Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan dan Sasaran, strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Bab ini memuat Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini berisi Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dengan mengacu pada tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

**BAB VII. PENUTUP**

Bab ini berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Lampiran



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Adapun Tugas Pokok BPKAD dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

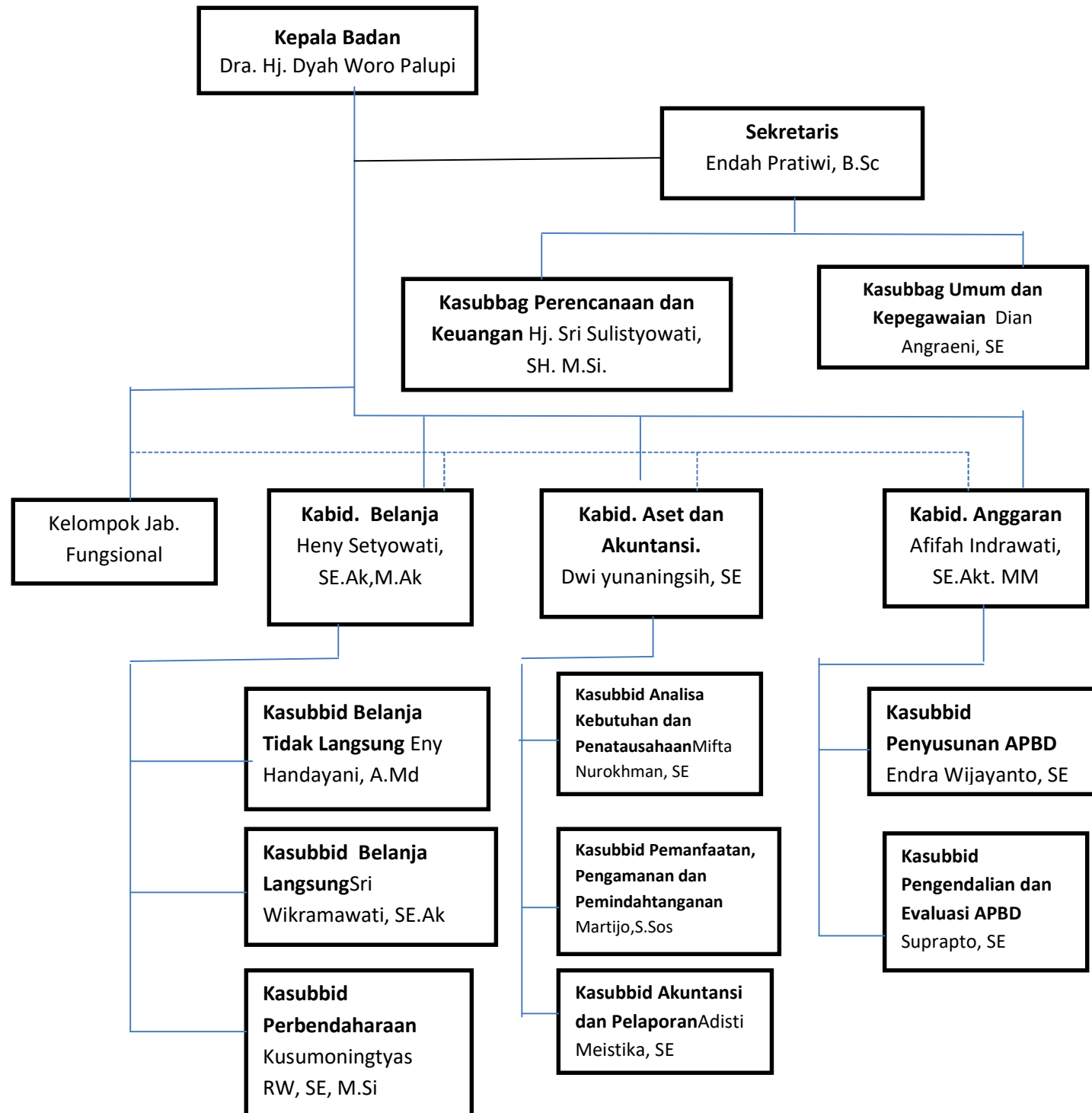
- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN



**Struktur Organisasi :**

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
3. Bidang Belanja dan Perbendaharaan, terdiri dari :
  - Sub Bidang Belanja Tidak Langsung ;
  - Sub Bidang Belanja Langsung ;
  - Sub Bidang Perbendaharaan.
4. Bidang Aset dan Akuntansi, terdiri dari :
  - Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
  - Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan;
  - Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - Sub Bidang Penyusunan APBD;
  - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD;



Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan tugas dan fungsi struktur Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang-Bidang sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
  - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
  - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
  - d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
  - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Anggaran  
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Anggaran;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- c. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi atas proses penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman Daerah;
- g. Penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah;
- h. Penyusunan standarisasi harga;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Belanja

Bidang Belanja mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan belanja, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian program kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Belanja mempunyai fungsi :

- a. Penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar;
- b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. Pelaksanaan pengendalian Belanja Daerah;
- d. Pengelolaan penggajian Pegawai;
- e. Pelaksanaan dan pemantauan atas penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang ditunjuk;
- f. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan penyimpanan dan penempatan uang Daerah;
- h. Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Aset dan Akuntansi

Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Aset dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik Daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi barang milik Daerah;
- d. pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- e. pelaksanaan pemindahtanganan;
- f. penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional;
- g. menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penunjukan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu;
- h. pengoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang/kerugian Daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. penyajian informasi keuangan Daerah dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah;
- l. pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah;
- m. pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

## B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 1. Sumber Daya Alam

Lokasi Kantor BPKAD terletak ditengah Kabupaten Kebumen tepatnya di Jalan Pahlawan Kebumen Nomor 138, Lokasi BPKAD terpisah dari kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah di Jalan Veteran.

Kondisi kantor masih baik, tempat yang strategis dan kondisi jalan yang bagus sehingga mudah untuk dicapai.

### 2. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas SDM BPKAD berjumlah 79 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 65 orang dan THL 13 orang PTT 1 orang.

Adapun rincian SDM BPKAD tersebut diantaranya sekretariat memiliki 20 orang karyawan PNS, Bidang Belanja memiliki 21 karyawan PNS, Bidang Anggaran memiliki 9

orang karyawan PNS, dan Bidang aset dan Akuntansi memiliki 15 orang karyawan PNS.

Dengan jumlah tersebut dirasa masih kurang mengingat tupoksi pekerjaan yang banyak, hal tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal, upaya atau solusi untuk menutupi kekurangan tersebut dengan merekrut tenaga harian lepas (THL) yang bersifat sementara selama masih dibutuhkan. Pada awal tahun Januari 2017, jumlah tenaga harian lepas di BPKAD sebanyak 13 orang yang terbanyak ada di bidang aset dan akuntansi, karena di bidang tersebut membutuhkan SDM yang lebih banyak untuk menginventarisasi aset.

Berdasarkan Eselon, eselon II sebanyak 1,26%, eselon III 5,06%, dan eselon IV sejumlah 12,65% yang terbanyak staff dan THL sebanyak 81,01%.

Berdasarkan tingkat pendidikan SDM di BPKAD diantaranya merupakan lulusan S2 5,06%, 29,11% lulusan S1, lulusan D3 10,12%, lulusan SMA 46,36% dan lulusan SMP 2,53% serta 3,79% lulusan SD.

Secara keseluruhan menurut pendidikan yang terbanyak di BPKAD merupakan lulusan SMA dan secara normatif, hal ini perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai, selain itu perlu diadakan bintek atau kursus terkait tupoksi pekerjaan.

Sedangkan diklat Struktural sudah terlaksana sebanyak 80% dan diupayakan bisa tercapai 100% yang terdiri dari tabel 2.1 berikut :



TABEL 2.1 DAFTAR KOMPOSISI SDM PERANGKAT DAERAH DPPKAD  
TAHUN 2017

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YG DIIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRU KTUR AL	FUNGSI ONAL	JML
ESELON II	1					1		1					1	1		1
ESELON III	1					1	2	1	1				4	4		4
ESELON IV		10				10	2	7	1				10	10		10
STAF		39	11	3		53	0	11	1	33	2	3	50			0
THL/PTT					14	14	0	3	5	6	0	0	14			0
JUMLAH	2	49	11	3	14	79	4	23	8	39	2	3	79	15	0	15
% DARI JML PEG	2,53	62,02	13,92	3,79	17,72	100,00	5,06	29,11	10,12	49,36	2,53	3,79	100,0 0	18,98	-	18,98

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah Instansi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Pelayanan Perangkat Daerah tidak akan maksimal tanpa adanya sarpras yang memadai.

Sarana dan Prasarana BPKAD saat ini sudah cukup mencukupi dan memadai seperti kendaraan dinas dan sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan, namun masih banyak yang memerlukan pemeliharaan, penambahan, maupun harus ada penggantian karena rusak. Hal tersebut akan dicukupi dalam jangka waktu 5 tahun secara bertahap sebagaimana tertuang dalam matriks program dan kegiatan BPKAD.

Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana BPKAD dapat dilihat di tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA BPKAD

No	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutu han Jangka 5 thn	Perlu Penamba han	Perlu Peme lihar aan	Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml				
1	Gedung								
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3			1	1		1	Indu k BPK AD
2	Kendaraan								
	Mobil	5	-		5	6	1	3	
	Sepeda Motor	28	-	1	29	32	26	21	Pere maja an
3	Sarpras Elektronik								
	AC Split	37			37	36	4	32	
	Kipas Angin	2			2	2	-	2	
	Televisi	9			9	10	1	9	
	Casette Recorder (Tape Recorder)	1			1	1	-	-	
	Wireless	2	-		2	2	1	2	
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	36		3	39	55	18	55	
	Stabilisator (stabilizer)	1			1	1	0	1	
No	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutu han Jangka 5 thn	Perlu Penamba han	Perlu Peme lihar aan	Ket

		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml				
	Camera digital	3			3	9	0	9	
	Dispenser	2		-	2	2	-	2	
	Handy Cam	-			-	1		1	
	P.C Unit	37		83	104				
	Note Book	30			30	50	6	44	
	Ploter	1			1	1		1	
	CPU	1			1	1		1	
	Printer	47			47	20	9	11	
	Printer	56			56	56		56	
	Printronic	-			-	3		3	
	Scanner	2			2	3	1	2	
	Server	8			8	11	1	10	
	Hub	5			5	7	-	7	
	LCD	3			3	6		6	
	Overhead Projektor	2		2	4	2	2		
	Teleprompter	1			1	1			
	Mesin Cetak Tangan	1			1	3	2	1	
	Sound System	2			2	2			
	Telephone (PABX)	1			1	1		1	
	Handy Talky	1			1	5		5	
	Facsimile	1			1	1		1	
	Pesawat Telephone	15			15	15		15	
	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1			1	1		1	
4	Sarpras Kantor								
	Portable Generating Set	1			1	1		1	
	Portable Water Pump	1			1	1		1	
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	9		2	11	10	1	7	
	Lemari Besi	15			15	21		21	
	Rak Besi/Metal	36			36	44	2		
	Rak Kayu	7	4		11	16	2	4	
	Filling Besi/Metal	31			31	35	1	4	
	Brankas	3			3	5		5	
	Lemari Sorok	4	2		6	10	4	2	
	Lemari kayu	4			4	31		3	
	Alat Detektor Uang Palsu			1	1	1			
NO	JENIS SARPRAS	KONDISI				Kebutuhan Jangka 5 thn	Perlu Penambahan	Perlu Peme-lihar-aan	Ket

		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JML				
	Papan Tulis	18		8	26	5			
	Perforator Besar	-	-		-	3		2	
	Kursi Besi/Metal	9			9	12			
	Meja Rapat	34	1		35	39		1	
	Meja Telpon	-			-	5			
	Meja Reseption	1			1	5	4		
	Meja Panjang	4			4	7			
	Kursi Rapat	111			111	148			
	Kursi Tamu	6			6	10	5		
	Kursi Putar	6			6	38			
	Kursi Biasa	83			83	73			
	Kursi Lipat	5			5	11			
	Meja Komputer	17			17	38			
	Meja Biro/ Meja Kerja	46			46	103			
	Mimbar/Podium	1			1	1			
	Timbangan Badan	1		1	1	1	1		
	Alat Pemadam Portable	6		2	6	6	2		
	Meja Kerja Pejabat	23			23	23			
	Kursi Kerja Pejabat	25			25	23			

Dari Tabel diatas terlihat bahwa masih banyak sarana dan prasaran yang perlu penambahan agar kinerja dapat berjalan dengan baik. Beberapa sarana dan prasarana penting yang diupayakan penambahan melalui kegiatan pembangunan sebagaimana pada matriks Renstra yaitu penambahan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk peremajaan. Beberapa sarana dan prasarana pendukung kelancaran kinerja seperti laptop, printer juga perlu penambahan kebutuhan pemeliharaan, oleh karena itu pemeliharaan sarana pelayanan administrasi perkantoran maupun anggaran wajib yang harus dialokasikan terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan wajib pada setia tahunnya.

### C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah.

#### 1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum adanya SOTK perubahan numenklatur OPD capaian kinerja pelayanan Dinas PPKAD berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen periode 2011-2015.

Kenaikan PAD setiap tahun selalu naik dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 317,35%, Untuk Presentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah dari target sebesar 85% terealisasi 77,22% Upaya keras yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai target tertib administrasi keuangan daerah masih belum terwujud, hal ini karena terkendala pencatatan aset yang masih dalam proses menuju penyempurnaan pelaporan aset yang akuntabel, selain itu tahun 2015 adanya perubahan sistem metode pelaporan keuangan di Kabupaten Kebumen yang semula cash basis menjadi *accrual basis* sehingga membutuhkan proses dan penyesuaian serta penyempurnaan dalam pelaporan keuangannya, upaya tertib administrasi keuangan daerah akan terus dilaksanakan dengan melalui penilaian Perangkat Daerah terbaik setiap tahunnya yang mendapatkan *reward* kendaraan dinas roda 2.

Capaian Kinerja Pelayanan selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

#### 2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari sisi pendanaan setiap tahun Dinas PPKAD mendapatkan anggaran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, penyerapan anggarannya selama 5 tahun rata rata 92,28%, yang artinya penyerapan anggaran sudah baik. Capaian Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat ditabel 2.5

Indikator Utama

TABEL 2.3. Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah  
DPPKAD KABUPATEN KEBUMEN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
1	Persentase kenaikan PAD		38%		85%	87,5 %	90%	92,5 %	95%	24,85 %	41,84 %	46,05%	312,10%	317,35%	29,17 %	47,77%	51,16%	337,40%	334,05%
2	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah		85%		75%	80%	80%	80%	80%	89%	89%	77,22 %	72%	77,2 %	118,66 %	96,52%	96,5 %	90%	96,5 %

Review Pencapaian Indikator Kinerja kegiatan Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH*	Targ et SPM	Targ et IKK	Targe t Indikator Lainn ya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
1	Pengesahan SPJ fungsional PERANGKAT DAERAH				182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tercapainya target pendapatan daerah				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terkirimnya surat/dokumen				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tercukupinya kebutuhan komunikasi,air dan listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terawatnya kendaraan dinas/operasional				70	77	78	75	75	70	75	77	70	75					
6	Terbayarnya honor dan lembur pengelola kegiatan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
8	Perbaikan peralatan kerja				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH*	Targ et SPM	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
9	Tersedianya alat tulis kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya barang cetak. Penggandaan dan penjilidan buku/dokumen				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas keluar daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH*	Targ et SPM	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
16	Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan social				0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%
17	Terlaksananya laporan pendapatan setiap bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tersedianya dokumen perencanaan, renja, Renstra, RKA/DPA, LKPJ/LPPD, Lakip				0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	100%
19	Tersusunnya peraturan byupati ttg indeks satuan harga				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100%	100%	100%	100%	100%
20	Tersedianya rancangan perda ttg APBD dan perbub APBD				65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%
21	Tersedianya rancangan perda PAPBD dan perbup PAPBD				65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH*	Targ et SPM	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
22	Tersusunnya raperda pertanggungjawab an pelaksanaan APBD, raperbub penjabaran pertanggungjawab an pelaksanaan APBD dan lap.realisasi smt 1 APBD				75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%
23	Terlaksananya rekonsiliasi pembayaran PBB dan up to date basisi data PBB				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
24	Rekonsiliasi administrasi keuangan dengan PERANGKAT DAERAH (petugas akuntansi)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
25	Tersedianya pengolahan data BMD dan penilaian aset				180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH*	Targ et SPM	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
26	Tersedianya papan nama tanah kepemilikan pemda, auransi kendaraan dinas roda 4 dan terselesaikannya TPTGR				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%
27	Penilaian aset obyek tertentu				180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100%	100%	100%	100%	100%
28	Terpeliharanya system pengelolaan keuangan daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
29	Pembinaan bendahara PERANGKAT DAERAH dan terverifikasinya SPJ				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
30	Terlaksananya pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
31	Tersusunnya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan				120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH*	Targ et SPM	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
32	Tercapainya target pendapatan pajak daerah				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
33	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan dan PBB				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
34	Tercapainya target pendapatan lain-lain daerah				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%
35	Terlaksananya pendataan obyek dan subyek PBB pola sismiop				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
36	Terselesaikannya tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi				0	0	0	12	12	0	0	0	12	12	-	-	-	100%	100%
37	Terkiirmnya aparaturnya yang mengikuti bimtek,workshop dan seminar				0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	-	-	-	-	100%
38	Tersedianya kendaraan dinas/operasional				100	100	100	100	100					75					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH*	Targ et SPM	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
39	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor				2	2	2	2	2	2	4	3	4	8	100%	200%	150%	200%	400%
40	Tersedianya mebeleur berupa meja kursi almari dan rak arsip				3	3	3	3	4	3	6	5	6	7	100%	200%	166%	200%	233%
41	Tersedianya sarpras kantor berupa computer PC,notebook,printer ,UPS,Sacnner,dll				2	2	2	3	2	6	5	7	6	8	200%	250%	350%	160%	350%
42	Terpeliharanya gedung kantor				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
43	Terpeliharanya sarpras kantor				9	9	9	9	9	9	10	9	10	12	100%	110%	100%	110%	120%
44	Terciptanya rekonsiliasi pelaporan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuha n	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.,00	2.207.,00	2.000,00	2.000.,00	5.000.,00	1.999,3,00	2.206,9,00	1.997.73,00	1.928,9,00	2.853,9,00	99,9	99,99	99,88	96,44	57	2.641.4	2.197,3
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	102.300.00	123.609.,00	200.298.,00	200.000,00	250.000.,00	81.767,00	102.813,8,00	144.392,9,00	180.119,5,00	216.609.,00	79,92	83,17	72,08	90	86,64	175.241,4	145.140,4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal	94.753.,00	94.753.,00	110.000,00	150.000.,00	205.000.,00	74.971,3,00	79.100.,2,00	109.900,2,00	113.904,6,00	117.676,5,00	79,12	83,48	99,90	75,93	57,4	130.901,2	99.110,5,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	165.732,00	197.894.,00	198.800,00	177.880,00	238.500,00	158.420,7,00	190.090,9,00	193.100,2,00	171.903,4,00	228.978,3,00	95,58	96,05	97,13	96,64	96	195.761,2	188.498,7
Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.800,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.793.00	2.000,00	4.961,7,00	4.997.6,00	8.737.4,00	99,75	100	99,23	99,95	87,37	4.960	4.697,9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	48.512,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00	19.825,6,00	39.919.3,00	19.983.,00	19.997.,00	64.979.7,00	40,86	99,79	99,91	99,98	99,96	57.152.	32.940,9
Penyediaan alat tulis kantor	44.280,00	46.480.,00	70.000,00	50.000,00	75.000,00	43.688.,00	46.476.,4,00	69.909,4,00	49.422,5,00	71.529.,5,00	98,66	99,99	99,87	92,72	95,37	57.152.	56.205,1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.400,00	38.400,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	31.793,2,00	38.168,1,00	48.495,2,00	46.362,7,00	63.040,1,00	82,79	99,39	96,99	92,72	84,05	50.360.	32.963,8

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuha n	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
enyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	11.280,00	10.280.00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	11.191,00	10.280,00	14.998,5,00	9.999,00	14.993,8,00	99,21	100	99,99	99,99	99,95	12.312	12.292.,4
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	3.320,00	2.000,00	6.500.00	7.500,00	10.000,00	2.523,00	1.742,00	4.351.00	7.425.,00	7.586.,00	75,99	87,1	66,93	99	75,86	5.864	4.725.4
Penyediaan makanan dan minuman	29.168.,00	50.168.,00	50.000,00	50.000.,00	100.000,00	26.209,8,00	48.696,6,00	49.921,4,00	49.981,5,00	74.618,8,00	89,85	97,06	99,84	99,96	74,61	55.867,2	49.885,6
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	53.600.,00	73.600.00	80.000.,00	77.500,00	110.000,00	32.978,1,00	42.611,4,00	55.089,8,00	73.978,9,00	96.337,5,00	61,52	57,89	68,86	95,45	67,25	78.940.	60.199,1
Penunjang Administrasi Perkantoran	39.384.,00	19.200.,00	7.200,00	0	0	39.384,00	19.200,00	7.200,00	0	0	100	100	100	0	0	13.156,8	13.156,8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4.000.,00	2.500,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	670,00	2.042,5,00	1.962,5,00	3.941,00	2.420.00	16,75	81,7	98,12	98,5	48,4	3.500.	2.207,2
Pengadaan Kendaraan dinas/operasio nal	48.950.,00	1.362.590.,0 0	7.350.000, 00	2.006.500,00	2.662.986,00	41.505,00	1.222.478.8, 00	7.300.187,00	1.807.024.4,0	2.558.299.4,00	84,79	89,71	99,32	90,05	96,06	2.686.20 5,2	2.585.89 8,9
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	82.500,00	238.000,00	167.500,00	145.000,00	0	82.372,4,00	237.669,9,00	166.424,9,00	141.525,00	0	99,84	99,86	99,35	97,60	126.600.	125.598,4
Pengadaan peralatan gedung kantor	217.302.00	52.000,00	0	0	0	210.079.9,00	49.767.5,00	0	0	0	96,67	95,70	0	0	0	53.860.4	51.969.4
Pengadaan mebeleur	0	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	57.407,5,00	48.332,5,00	48.350.,00	48.575.,00	0	99,83	96,66	96,7	97,15	41.500.	40.533
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	0	628.805,00	290.500,00	404.872,00	425.000,00	0	550.322.1,00	288.406,00	394.972.5,0 0	412.530,8,0 0	0	87,5	99,27	97,55	97,06	349.835.4	329.246.2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44.960,00	78.000,00	250.000.,0 0	150.000,00	150.000,00	42.334.,00	77.630.,00	246.835.8,00	148.716.9,00	148.216,00	94,15	99,5	98,73	99,14	98,81	134.592.	132.746.5

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuha n	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Real isasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	13.246,00	10.000,00	10.000,00	10.000.,00	10.000,00	12.970,00	9.891.5,00	9.555.,00	9.875,00	9.250.,00	97,91	98,91	95,55	98,75	92,5	10.649,2	10.308,3
Pengembangan potensi unggulan daerah	154.500,00	139.600,00	0	0	0	137.150.9,00	98.978.67,00	0	0	0	88,77	70,90	0	0	0	58.820.	47.225,9
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	20.000.,00	0	0	0	0	17.500.,00	0	0-	0	0	87,5	4.000	3.500
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	10.940.9,00	0	0	0	0	54,70	4.000	2.188,18
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	40.000,00	0	0	0	0	35.851.7,00	0	0	0	0	89,63	0	0	8.000	7.170,3
Penyusunan standar satuan harga	100.000.,00	100.000.,00	87.000,00	100.000.00	70.000,00	91.429,3,00	59.220,8,00	66.666.,58,00	73.858,1,00	66.234.7,00	91,43	59,22	76,63	73,86	94,62	91.400	71.481.921
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribus	120.000.,00	0	0	0	0	92.864.4,00	0	0	0	0	77,39	0	0	0	0	24.000	18.572.8
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	155.000,00	200.000,00	200.000,00	277.000,00	295.000,00	147.601.1,00	192.245.3,00	185.175,9,00	257.692,6,00	286.265.4,00	95,23	96,12	92,59	93,03	97,04	225.400	213.796,1
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	140.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	235.000,00	125.800,2,00	140.190.1,00	166.804.6,00	192.363.8,00	220.984,03,00	89,86	93,46	95,32	96,18	94,04	180.000.	169.228.5



Indikator*	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuha n	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	150.000,00	160.000,00	175.000.,00	175.000,00	200.000,00	146.617.3,00	143.730,8,00	165.849,8,00	169.960,7,00	194.618,00	97,74	89,83	94,77	97,12	97,31	172.000	164.155,3
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	0	0	337.500,00	160.813,00	0	0	0	321.145,00	156.137.8,00	0	0	0	95,15	97,09	0	99.662,6	95.456,5
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	150.000,00	150.000,00	150.000,00	240.000,00	0	123.310.4,00	103.919,4,00	126.783.1,00	227.510.8,00	0	82,21	69,28	84,52	94,80	0	138.000.	116.304.7
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	160.000,00	0	0	0	0	149.343.5,00	0	0	0	0	93,34	0	0	0	0	32.000	29.868.7
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	270.000,00	374.000,00	620.110,00	493.065,00	421.772,00	195.366.1,00	264.797.6,00	568.478.2,00	450.448.5,00	375.281.8,00	72,36	70,80	91,67	91,36	88,98	435.789,4	370.874.4
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	0	0	50.000,00	50.000,00	70.200,00	0	0	31.935,00	32.972,00	23.014,00	0	0	63,87	65,94	32,78	34.040.000	17.584.220
Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	125.000,00	74.850,00	100.000,00	150.000,00	80.000,00	121.453.2,00	64.717.1,00	89.997.8,00	131.469.5,00	77.855.,00	97,16	86,46	90,00	87,65	97,32	105.970	97.098,5
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	25.000,00	25.000,00	75.000,00	90.000,00	0	23.757,5,00	17.723,5,00	70.421.,00	83.018,2,00	0	0	70,89	93,89	92,24	0	43.000	38.984

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuha n	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	421.931,00	420.000,00	420.000.,00	483.180,00	518.775,00	398.593.4,00	407.874.7,00	381.768.4,00	442.404.6,00	467.863,2,00	94,47	97,11	90,90	91,56	90,19	452.777,2	419.700,8
Pengelolaan Gaji PNSD	265.694,00	310.000,00	295.000,00	335.000,00	335.000,00	263.399.9,00	308.145.3,00	292.550.5,00	332.763.1,00	331.556.150,00	99,14	99,40	99,17	99,33	98,97	308.138,8	305.683
Penyusunan KUAPBD dan PPAS	65.000,00	80.525.00	130.000,00	85.093,00	95.000,00	56.945.1,00	76.808,06,00	126.183,6,00	80.916,4,00	90.489,4,00	87,61	95,38	97,06	95,09	95,25	91.123,6	86.268,5
Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	17.177,3,00	0	0	0	0	85,89	4.000.	3.435,47
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	175.000,00	245.000,00	359.600.,00	460.000,00	524.575.00	156.103.3,00	224.401,00	328.585.07,00	370.092,5,00	416.786,0,00	89,20	91,59	91,37	80,45	79,45	352.835.	299.193.6
Intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan dan PBB	850.508.00	1.369.939,00	2.500.297,00	2.678.791,00	2.488.056,00	777.839.5,00	1.330.265.6,00	2.464.6744,00	2.558.658,4,00	2.430.325,1,00	91,46	97,10	98,57	95,51	97,68	1.977.518,2	1.912.352,6
Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	80.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	89.800,00	67.258.1,00	50.326.1,00	83.955.5,00	84.482.9,00	85.089.19,00	84,07	71,89	83,96	84,48	94,75	87.960	74.222,4
Pendataan obyek dan subyek PBB pola sismiop	1.302.350,00	382.250,00	155.920,00	210.000,00	210.000,00	1.230.29,1,00	359.302,2,00	153.077.4,00	195.985,2,00	203.240,00	94,47	94,00	98,18	93,34	96,78	452.104	428.379,8

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuha n	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Pemutakhiran dan pemeliharaan basis data obyek Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0	190.000,00	0	0	0	0	185.237,1,0 0	0	0	0	0	97,49%	38.000	37.047,4
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	251.855,00	0	0	0	0	186.472,8,0 0	0	0	0	0	70,04%	50.371	37.294,5
Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 6	637.471,00	678.475,00	632.000.,0 0	668.500,00	634.000,00	569.767,3,00	582.215,5,00	594.818,2,00	615.354,5,00	596.615.307 ,00	89,37	85,81	94,12	92,05	94,10%	650.089,2	591.754,1
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Daerah	0	250.000,00	180.000,00	195.000,00	210.000,00	-	125.689,7,00	151.920,3,00	178.865,3,00	194.042,00	0	50,28	84,40	91,73	92,40%	167.000	130.103,4
Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	92.218,6,00	0	0	0	0	92,22%	20.000	18.443,7
Rekonsiliasi Kas Daerah	139.700,00	146.000,00	175.000,00	180.545,00	180.000,00	128.531,3,0 0	142.660,1,00	160.910,9,00	169.671,4,0 0	166.113,6,0 0	92,00	97,71	91,95	93,98	92,28%	164.249.	153.577,5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	0	65.000,00	65.000,00	0	0	0	62.582.,00	62.239.5,00	0	0	0	96,28	95,75%	26.000	24.964,3

Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten kebumen  
Gambaran kinerja DPPKAD 5 ( lima) tahun sebelumnya diperoleh dari LKD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN	ANGGARAN PADA TH KE..					Realisai Anggaran pada th ke..					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Pendapatan Asli daerah</b>																	
Hasil pajak daerah	15.019.000	18.435.000	36.485.100	40.347.610	46.346.000	17.326.903,7	20.375.075,3	42.012.443,8	46.312.651,9	52.015.233,6	115,36%	110,53%	115,14%	114,78%	112,23%	31.326.542	35.608,461
Hasil retribusi daerah	18.425.920	26.039,5	25.848.755	35.486.648	26.270.679	16.417.314,2	24.787.134,7	24.542.086,1	43.343.968,6	26.897.280,4	89,09%	95,19%	94,94%	122,14%	102,38%	26.414.316,6	27.197.560,4
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.629.740	6.741.341	5.502.072	7.918.783	8.436.286	2.754.419,6	6.822.776,8	5.506.191,03	8.008.929,3	8.561.009,4	104,74%	101,20%	100%	101,13%	101,47%	6.245.644,4	6.330.665,2
Lain-lain PAD yang sah	34.817.621	39.680.918	48.884.562	79.833.305	140.604,07	37.014.526,7	50.389.383,6	59.421.015,4	144.413.952,1	157.685.731,9	106,30%	126,98%	121,55%	143,31%	112,14%	68.764.096	89.784.921,9
<b>Dana Perimbangan</b>																	
Bagi hasil pajak/bukan pajak	48.715.568	47.241.995	30.811.786	26.362.854	34.576.982	45.863.492,5	49.989.322,8	34.564.265,8	27.498.627,9	30.994.004,3	94,14%	105,81%	112,17%	104,30%	89,63%	37.541.837	37.781.942,7
Dana Alokasi umum	731.980.739	906.222.007	1.021.871.180	1.125.568.884	1.146.008.708	731.980.739	906.222.007	1.021.871.180	1.125.568.884	1.146.008.708	100%	100	100%	100%	100%	986.330.303,6	986.330.303,6
Dana alokasi khusus	79.150.700	100.103.330	79.063.860	80.709.170	166.312.470	79.150.700	100.103.330	79.063.860	80.709.170	166.313.240	100%	100	100%	100%	100%	101.067.906	101.068.060
<b>Lain-lain Pendapatan daerah yang sah</b>																	

URAIA N	ANGGARAN PADA TH KE..					Realisai Anggaran pada th ke..					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011 1	2012 2	2013 3	2014 4	2015 5	Angga ran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapata n hibah	118.717.086	724.165	2.000.000	0	14.417.531	117.637.460,2	546.900,5	0	1.038.000	21.148.531	99,09 %	75,52 %	0	51,9%	146,58%	27.171.796,4	28.074.17.,3
Dana darurat																	
Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerinta h daerah lainnya	30.303.811	41.463.289,	43.060.019	58.926.366	99.365.806	39.736.748.6	56.570.858.5	66.179.825,2	69.778.066,1	114.070.000,1	131,12%	136,43%	153,69%	118,41%	114,79%	54.623.858,2	69.267.099,7
Dana penyesuaia n dan aotonomi khusus	102.908.755	163.270.232	232.109.678	291.252.654	346.575.321	95.198.962,4	163.270.232	219.576.541	291.252.654	346.575.321	92,5%	100%	94.60 %	100%	100%	227.223.328	223.174.742
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	90.070.390	67.547.065	73.940.615	129.144.853	130.647.312	90.070.390	67.474.965	73.793.245,4	129.122.874.9	130.074.631.7	100%	109,24%	99,80 %	99,98 %	99,56 %	98.270.047	98.107.221,4
Bagi HAsil Retribusi dari Provinsi	79.214	50.499	50.499	0	0	123.965,8	133.460,8	0	0	0	156,49%	264,28%	0	0	0	36.042.400	51.485,3
Alokasi dana yang bersumber dari APBN	-0	0	0	0	125.844.565	0	0	0	0	125.844.565	0	0	0	0	100%	25.168.913	25.168.913

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Capaian pelayanan Perangkat Daerah tahun 2011-2015 yaitu ada 2 indikator yaitu Presentase Kenaikan PAD dan Prosentase Tertib administrasi Keuangan.

Untuk Prosentase Kenaikan PAD mampu mencapai target.

Sedangkan untuk Prosentase tertib administrasi keuangan daerah dari target sebesar 85% hanya mampu tercapai sebesar 77,2 %.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKAD beberapa indikator kinerja yang perlu dicapai yaitu : capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah, Capaian Realisasi Belanja, Capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu, Capaian SKPD tertib administrasi aset tepat waktu.

Untuk mengetahui beberapa permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
				Internal	Eksternal	
1	Capaian realisasi belanja	90%	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian kelengkapan dokumen belanja memakan waktu yang cukup lama karena fungsi verifikasi pada SKPD tidak optimal dan jumlah personil terbatas, peneliti dokumen Belanja Langsung 5 orang, peneliti dokumen Belanja Tidak Langsung 5 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja SKPD tidak sinkron dengan anggaran kas</li> <li>- Fungsi PPK-SKPD dalam verifikasi dokumen belanja SKPD belum optimal</li> <li>- Jumlah SKPD / Unit kerjacukup banyak yaitu 194 OPD</li> <li>- Peraturan Perundang-undangan yang berubah-ubah</li> </ul>	Tertib pengelolaan belanja daerah oleh OPD belum optimal karena penyerapan belanja oleh OPD sebagian besar dilakukan di akhir tahunanggaran
2	Capaian Penerbitan Dokumen Keuangan daerah tepat waktu	100%	100%	Proses entry RKA, DPA, DPPA	Proses Penetapan APBD, PAPBD	Belum optimalnya pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA

						Perangkat Daerah
3	Capaian Tertib pelaporan keuangan dan aset tepat waktu	70%	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola aset daerah</li> <li>- Belum sempurnanya system pengelolaan data aset berbasis akrual</li> <li>- Kurangnya sarpras penunjang pengelolaan. BMD</li> <li>- Kurangnya SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi</li> <li>- Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dengan sistem informasi pengelolaan aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya SDM pengelola aset di tingkat Perangkat Daerah/unit pengguna barang</li> <li>- Sering terjadinya pergantian petugas pengurus barang di tingkat Perangkat Daerah.</li> <li>- SIM Aset belum online</li> <li>- Kurangnya SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi di SKPD</li> <li>- Rendahnya pemahaman akuntansi berbasis akrual</li> <li>- Pergantian pengurus barang di SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya inventarisasi aset daerah</li> <li>- Belum sempurnanya pengelolaan keuangan berbasis akrual</li> </ul>
No	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat



				Internal	Eksternal	Daerah
4	Kajian Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L	-	-	-	-	-
	Kajian Renstra terhadap Hasil Telaahan Dokumen RT/RW	Tdk ada arahan	Dok RT/RW Kab Kbm	-	-	-
	Kajian Renstra terhadap Hasil Analisis Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015	Tidak ada rekomendasi	Dok KLHS RPJMD kab Kbm 2016-2021	-	-	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan permasalahan di BPKAD Kabupaten Kebumen.

Beberapa permasalahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, di antaranya :

- 1) Tertib pengelolaan belanja oleh OPD belum optimal yaitu ditandai dengan penyerapan belanja oleh OPD sebagian besar dilakukan di akhir tahun anggaran. Capaian realisasi belanja saat ini terealisasi 90%, hal tersebut dipengaruhi faktor internal yaitu jumlah personil terbatas, BL 5 orang, BTL 5 orang dan faktor eksternal yaitu Fungsi PPK-SKPD dalam verifikasi dokumen belanja SKPD belum optimal, Realisasi belanja SKPD tidak sinkron dengan anggaran kas dan Peraturan Perundang-undangan yang berubah-ubah, oleh sebab itu BPKAD perlu mengoptimalkan pembinaan bagi OPD terkait pelaksanaan APBD dan koordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tupoksi dalam evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBD
- 2) Belum optimalnya pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah, hal tersebut diukur melalui capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu atau 100% yang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu proses entry RKA, DPA dan DPPA serta faktor eksternal yaitu proses penetapan APBD dan PAPBD.
- 3) Belum optimalnya inventarisasi aset daerah dan belum sempurnanya pengelolaan keuangan berbasis akrual yang diukur melalui capaian tertib pelaporan keuangan dan aset, dan dipengaruhi faktor internal diantaranya masih kurangnya kapasitas SDM pengelola aset daerah serta belum sempurnanya system pengelolaan keuangan berbasis akrual selain itu dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yaitu masih kurangnya SDM pengelola aset ditingkat Perangkat Daerah /unit Perangkat Daerah.

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis (lingkungan Eksternal)

Isu eksternal yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari isu-isu dari dunia internasional, nasional dan provinsi.

Di tingkat Internasional hampir semua negara sudah menggunakan system pengelolaan keuangan berbasis akrual, hal tersebut mempengaruhi permasalahan dikarenakan laporan keuangan saat ini juga harus menggunakan akrual basis, dan sampai saat ini system pengelolaan keuangan berbasis akrual di Kabupaten kebumen masih terus disempurnakan.

Di Tingkat nasional seringkali perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan struktur organisasi juga mempengaruhi jalannya pengelolaan keuangan yang ada di daerah, selain itu adanya moratorium ASN selama beberapa tahun juga menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pengelolaan keuangan.

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami pengelolaan aset dan akuntansi Daerah akan menjadi hambatan mengingat aset daerah saat ini menjadi salah satu bahan utama pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu solusinya dengan menerima atau merekrut tenaga harian lepas untuk mengisi kekurangan tersebut, selain itu dengan diadakannya atau mengikuti bimbingan teknis atau kursus-kursus terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Isu-isu strategis (lingkungan eksternal ) diatas diambil berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah  
Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi isu-isu eksternal bisa dilihat ditabel 3.2.

Tabel 3.2  
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	system pengelolaan keuangan berbasis akrual sudah digunakan hampir semua negara	Seringnya terjadi Perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan struktur organisasi;	- Kurangnya kapasitas SDM pengelola aset ditingkat Perangkat Daerah/Unit Pengguna Barang Belum optimalnya konsolidasi pengelolaan aset Pada Perangkat Daerah yang memiliki unit Perangkat Daerah	Inventarisasi barang daerah masih belum akuntabel
2	perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja	Adanya moratorium penerimaan PNS selama beberapa tahun ini menyebabkan kurangnya kapasitas SDM di banyak wilayah	Kurangnya kapasitas SDM pengelola akuntansi ditingkat Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah	Belum sempurnanya system pengelolaan keuangan berbasis akrual

C. Telaah Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah

Visi Bupati Kebumen Tahun 2016-2021 yaitu Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan. Adapun misinya ada 6 dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 6 yaitu Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama. Yang diimplemantasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kurangnya kuantitas SDM	- Moratorium PNS	- Adanya tenaga non PNS
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Masih Kurangnya Sarana/Prasarana aparatur yang memadai	- Kemajuan IT yang membutuhkan sarpras yang mendukung	- Inventarisir sarpras guna memenuhi kebutuhan
	3. Program pengembangan data/informasi	- Belum semua SDM berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	- Kurangnya koordinasi internal untuk meningkatkan ketertiban administrasi perencanaan dan keuangan	- Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Visi: Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	- Belum terdokumen-nya database secara kontinue dan up to date	- kurang Tertib Pengumpulan data penyusunan database	- Penyusunan database BPKAD dengan didukung seluruh komponen Perangkat Daerah
	5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pengelola aset dan akuntansi	- Keterbatasan kemampuan aparatur di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah - Adanya rakorpop tiap triwulan

Visi: Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerapan belanja oleh OPD sebagian besar dilakukan di akhir tahun anggaran</li> <li>- Belum optimalnya pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA PD</li> <li>- Belum optimalnya inventarisasi aset daerah</li> <li>- Belum sempurna-nya pengelolaan keuangan ber basis akrual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan anggaran kas dari Perangkat Daerah belum tepat</li> <li>- Fungsi verifikasi belanja oleh PPK-SKPD belum optimal sehingga personil pada BPKAD saat meneliti dokumen pencairan lebih lama</li> <li>- Proses entry RKA/DPA yang tidak sesuai jadwal</li> <li>- Masih kurangnya kapasitas SDM Pengelola aset</li> <li>- Masih perlunya penyempurnaan system pengelolaan keuangan berbasis akrual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya tim Tim Verifikasi RKA/DPA Perangkat Daerah</li> <li>- Tim Verifikasi RKA/DPA-SKPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi anggaran kas</li> <li>- Koordinasi dan Sosialisasi agar pelaporan aset lebih akurat dan akuratabel</li> <li>- Koordinasi dan sosialisasi serta pelatihan dengan pihak terkait untuk penyempurnaan sytem pengelolaan keuangan</li> </ul>



Visi: Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	- Tertib pengelolaan keuangan daerah belum optimal	- Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan	- Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk meningkatkan ketertiban administrasi keuangan
	8. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Adanya moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan kurangnya SDM di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Adanya kemajuan IT dan Teknologi yang membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung teknologi tersebut dengan cepat.
3. Kurangnya koordinasi internal untuk meningkatkan ketertiban administrasi perencanaan yang disebabkan masih adanya SDM yang belum berperan aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi.
4. Masih kurang tertibnya pengumpulan dan penyusunan data yang dibutuhkan dalam penyusunan database yang up to date
5. Keterbatasan kemampuan aparatur di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disebabkan kurangnya pelatihan/bimtek yang terkait pengelolaan keuangan daerah.
6. Perencanaan anggaran kas dari Perangkat Daerah belum tepat yang membuat Belum optimalnya kegiatan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD
7. Proses entry RKA/DPA yang tidak sesuai jadwal membuat Belum optimalnya pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah
8. Masih kurangnya kapasitas SDM Pengelola aset yang membuat Belum optimalnya inventarisasi aset daerah
9. Masih perlunya penyempurnaan system pengelolaan keuangan berbasis akrual.
10. Adanya masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya pajak daerah untuk pembangunan yang menyebabkan beberapa hal seperti laporan wajib pajak tidak sesuai standar dan adanya wajib pajak yang belum mengerti system IT pajak daerah
11. Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan yang juga menyebabkan tertib pengelolaan daerah menjadi kurang optimal.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain :

1. Adanya tenaga non PNS yang mengatasi permasalahan kekurangan sumber daya manusia.
2. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana guna pemenuhan kebutuhan tata laksana perkantoran
3. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, hal tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh

komponen didalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Penyusunan database BPKAD dengan didukung seluruh komponen Perangkat Daerah sehingga menghasilkan database yang up to date
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
6. Dengan diadakannya Rakorpop yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Adanya tim verifikasi RKA dan DPA Perangkat daerah untuk mencermati setiap DPA/RKA yang dibuat oleh perangkat daerah
8. Koordinasi dan Sosialisasi agar pelaporan aset lebih akurat dan akuratabel
9. Koordinasi dan sosialisasi serta pelatihan dengan pihak terkait untuk penyempurnaan sytem pengelolaan keuangan
10. Pelayanan pajak dan Pengawasan berbasis IT agar memudahkan masyarakat dan dalam menyongsong era keterbukaan, serta
11. Sosialisasi pajak berbasis IT yang terus menerus kepada masyarakat agar semakin menyadari pentingnya pajak daerah bagi pembangunan
12. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk meningkatkan ketertiban administrasi keuangan

#### D. Penentuan isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut dapat ditentukan beberapa issue strategis antara lain :

1. Penambahan Sarana/Prasarana aparatur yang memadai
2. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh SDM yang terkait
3. Penyusunan database Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara kontinue dan *up to date*
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan
5. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan APBD lebih optimal

6. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada Tim Verifikasi untuk meningkatkan pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah
7. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada perangkat daerah agar inventarisasi aset daerah dapat optimal
8. Penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual melalui koordinasi dan sosialisasi kepada SDM perangkat daerah yang terkait
9. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk meningkatkan ketertiban administrasi keuangan daerah.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;

7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

#### B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good*

*and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 Misi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejalan dengan Misi Bupati yang ke 6 yaitu Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

#### C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2016 – 2021 , yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya layanan kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan berupa anggaran belanja daerah, pendapatan daerah dan aset daerah dan dokumen keuangan daerah

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1

#### D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disajikan pada tabel 4.3 berikut ini.



Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Perangkat

Daerah : BPKAD

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan			
MISI : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Meningkatnya layanan kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa Pelayanan administrasi Perkantoran</li> <li>- Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>- Penyediaan data –data pendukung pengelolaan keuangan dan asset.</li> <li>- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>- Pengelolaan dan Penyusunan data statistic</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> </ul>
Meningkatkan Pengelolaan keuangan dan asset Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan berupa anggaran belanja daerah, pendapatan daerah, dan asset daerah dan dokumen keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan daerah</li> <li>- Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD</li> <li>- Peningkatan pengelolaan asset daerah</li> <li>- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>- Peningkatan Pendapatan Daerah</li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Peningkatan akuntabilitas system pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan dengan strategi Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah dan Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik dengan kebijakan Peningkatan akuntabilitas system pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan dengan beberapa kebijakan yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur guna mendukung peningkatan pengelolaan keuangan
3. Pengelolaan dan Penyusunan data statistik agar didapatkan data yang valid dan akuntabel
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur agar didapatkan SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan
5. Peningkatan dan Pengendalian pengelolaan keuangan daerah
6. Peningkatan pendapatan daerah

Adapun strategi yang dilakukan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah dan meningkatkan prosedur pelaporan system keuangan yang berbasis akrual dan system monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik melalui :

1. Penyediaan jasa Pelayanan administrasi Perkantoran
2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
3. Penyediaan data –data pendukung pengelolaan keuangan dan asset.
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan pelatihan pelatihan
5. Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan daerah
6. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD
7. Peningkatan pengelolaan asset daerah
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### E. Rencana Program

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 8 (delapan) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan data/informasi
4. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

#### F. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Penunjang Administrasi Perkantoran
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
15. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
16. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
17. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
18. Kegiatan Pengadaan mebeleur
19. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

21. Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
22. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
23. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
24. Kegiatan penyusunan standar satuan harga
25. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
26. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
27. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD
28. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang milik daerah
29. Kegiatan pengamanan aset/barang milik daerah
30. Kegiatan Pengelolaan Belanja Langsung
31. Kegiatan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
32. Kegiatan Penyusunan KUAPBD dan PPAS
33. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain lain daerah
34. Kegiatan Implementasi Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
35. Kegiatan Pengendalian Kas Daerah
36. Kegiatan Penyusunan Rancangan regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah
37. Kegiatan penunjang bantuan keuangan/bantuan sosial

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA BPKAD

#### YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mendukung indicator Kinerja utama Daerah yang menjadi Tupoksi Perangkat Daerah yaitu Opini BPK atas LKPD melalui indicator program Opini BPK atas LKPD, Capaian realisasi belanja, Capaian penerbitan Dokumen Keuangan Daerah tepat waktu, capaian Perangkat Daerah tertib administrasi aset tepat waktu, capaian realisasi pendapatan dan jumlah Perangkat Daerah yang mengirim SPJ fungsional tepat waktu.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

#### A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke empat.

#### B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;

4. Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641015 198903 2 006